



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS KEJAKSAAN DALAM HAL BANTUAN HUKUM
SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG PERDATA LITIGASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI
KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu



DISUSUN OLEH :

NUR LAILATURRAHMAH
NIM : 11727201360

**KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN ILMU HUKUM S1
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU RIAU
2021 M / 1442 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Tugas Bantuan Hukum Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”* yang ditulis oleh:

Nama : NUR LAILATURRAHMAH

NIM : 11727201360

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Dzulqaidah 1442 H
21 Juni 2021 M

Pembimbing Skripsi

Nur Hidayat, S.H., M.H.
NIK. 130217038

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN TUGAS KEJAKSAAN DALAM HAL BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG PERDATA LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU"* yang ditulis oleh :

Nama : **NUR LAILATURRAHMAH**
 NIM : 11727201360
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag.

Sekretaris

Basir, S.H., M.H.

Penguji I

Musrifah, S.H., M.H.

Penguji II

Ilham Akbar, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jaksa sebagai pengacara negara bewenang melakukan tugas bantuan hukum di bidang perdata secara litigasi (dalam pengadilan) atas nama negara atau pemerintah berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004. Berdasarkan pasal tersebut, seharusnya Jaksa dapat menjadi kuasa hukum dalam menyelesaikan perkara perdata mewakili negara atau pemerintah guna menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah. Namun, fenomena yang terjadi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, bahwa sedikitnya perkara perdata yang ditangani atau masuk di unit datun (perdata dan tata usaha negara) pada bidang tugas bantuan hukum (litigasi) selama kurun waktu 5 tahun yakni hanya 11 perkara, karena para lembaga pemerintah/BUMN/BUMD Pekanbaru dalam membela kepentingannya di pengadilan tidak menggunakan jasa bantuan hukum Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, melainkan menggunakan firma hukum luar atau biro hukum di masing-masing lembaga tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta faktor penghambat pelaksanaan tugas tersebut. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan metode pendekatan efektivitas hukum. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dianalisa menggunakan analisis kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan, pertama pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi sebagaimana termaktub dalam pasal 30 ayat 2 UU No.16 Tahun 2004 di Kejaksaan Negeri Pekanbaru belum berjalan maksimal. Kedua, disebabkan oleh beberapa faktor yakni: Rata-rata para lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD Pekanbaru masih tidak memahami dan mengetahui fungsi kejaksaan dalam bidang penanganan perdata; masing-masing lembaga rata-rata sudah memiliki biro hukum tersendiri untuk mewakili kepentingan para lembaga tersebut; ada rasa segan dari lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD untuk menggunakan Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingannya; penggunaan jasa Pengacara Negara kejaksaan tidak bersifat *mandatory* atau kewajiban, melainkan *optional* atau pilihan.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Bantuan Hukum, Kejaksaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan kerendhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN TUGAS KEJAKSAAN DALAM HAL BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG PERDATA LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau yang akan memberi syafa’at kelak ketika manusia dilanda kebingungan dalam kepanikan dan tidak ada seorangpun yang dapat memberikan syafa’atnya kepada umat manusia kecuali beliau, beliau adalah Nabi Muhammad ﷺ semoga kelak kita mendapat bagian dari syafa’at beliau, amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Diri sendiri yang telah mau bertahan dan kuat sejauh ini, bergadang setiap malam, berjuang menyelesaikan skripsi ini, bertarung dengan diri sendiri melawan rasa malas, jenuh, *burnout*. Terima kasih, kamu hebat diri sendiri.
2. Ibunda tercinta Dra.Siti Subandiyah, yang luar biasa hebat dalam mendidik anak-anaknya, selalu memberikan semangat, dukungan spiritual, emosional, finansial dan selalu mendoakan di setiap sujudnya untuk kelancaran skripsi ini, dan kesuksesan dunia akhirat anak-anaknya.
3. Adek, sepupu, keponakan : M.Nasta'in, M.Nasrullah, Siti Nurjanah,S.E., Ely Sumarni,S.E., Puji Lestari,S.Pd dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA. selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Firdaus, S.H. M.H., selaku Ketua Jurusan Jurusan Ilmu Hukum yang telah menolak, menerima, memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam pengajuan judul skripsi.
7. Bapak Dr. Nurhidayat, S.H. M.H., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- membantu, memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Magfirah, M.A, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mempermudah dan mempercepat urusan penulis dalam hal perkuliahan. Serta Bapak/Ibu seluruh staf dan karyawan Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama kuliah, serta bekerjasama dengan baik untuk mewujudkan kampus “Word Class University” bersama-sama.
 9. Seluruh “Pahlawan Pendidikan” para dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang telah berjuang di bidangnya untuk mewujudkan sumber daya manusia indonesia yang berpendidikan dan berakhlakul karimah.
 10. Jaksa Ridwan Dahniel,S.H.,M.H. selaku Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Jaksa Jefry Armando Pohan,S.H.,M.H. selaku Kasubsi Perdata Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kak ii dan para staf di bidang Datun Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang telah meluangkan waktu, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melakukan wawancara dan memperoleh data guna membantu penelitian skripsi ini.
 11. Bapak dan Ibu pegawai/karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau baik di bagian ke-rektoratan, perpustakaan, dan bagian-bagian lainnya yang telah bersedia bekerjasama dan memberikan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12. Kak Safriandi, S.H. yang telah meluangkan waktunya, membantu penulis selama penelitian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta memberikan semangat kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman Apartemen C02, C03, C04 dan Kos Muslimah : Mbak Kiki, S.E. Mbak Putri, S.E., Kak Alfi, S.Pd, Kak Sarah, S.E., Ain, S.Si, Uti, S.Pd, Ade, S.Ak, yang telah menjadi keluarga dan rumah kedua selama merantau di Pekanbaru. Hujan, panas, dingin, semi, gugur dilalui bersama, saling mendoakan, menguatkan, membantu, menyemangati dan mengingatkan dalam berbagai hal. Semoga hubungan tali silaturahmi ini tetap terjalin kekal.
14. Beat Squad : Okta Sofia Rahmi, S.H, Nola Arulia Angriani, S.H., Ulfa Salsabila, S.H., yang menjadi teman dekat selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum, yang saling mendoakan, memberikan semangat, mengingatkan dan memberikan informasi kepada penulis dalam berbagai hal terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Shohibul Jannah : Aulan Nufus, S.H., Fitria, S.H. sahabat sedari MTsN, MAN, lanjut kuliah di jurusan yang sama, namun beda universitas di provinsi yang sama, yang turut selalu mendoakan, membantu, dan menyemangati penulis dalam segala hal.
16. Semua rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2017, Ilmu Hukum kelas A “Progreption”, HTN B dan para senior, junior di Fakultas Syariah dan Hukum serta rekan-rekan Sekolah Inspirasi Suska, yang telah memberikan warna selama perkuliahan ini, memberikan semangat dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- informasi kepada penulis dalam berbagai hal terutama selama proses penyelesaian skripsi.
17. Teman-teman seperdosbingan : Cici Rianci, S.H., Zahratul Aini, S.H. yang menjadi tempat curhat berkeluh kesah saat bimbingan skripsi, selalu memberikan semangat, mengingatkan dan memberikan informasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
18. Orang-orang baik yang selalu menjadi penyemangat/pengingat/pemberi informasi kepada penulis : Revika Putri Marta,S.H., Lusiana Putri,S.H., Aprilia Dwidasmaharani Putri,S.H., Alexs Alfadinata,S.H., Muhammad Rafli,S.Psi, Rahmatun Nisa,S.Pd, Al-Mario,S.H.,M.H., dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih banyak orang-orang baik, barakallahu fiik.
19. Orang-orang baik lainnya yang selalu bertanya; sudah sampai bab berapa, kapan selesai, di saat penulis sedang malas, jenuh, sehingga membuat penulis gelisah, kembali sadar dan terpacu untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengingatkan orang-orang baik.
- Atas do'a, bimbingan dan dukungan dari mereka penulis mengucapkan terimakasih, karena sekecil apapun dukungan dari mereka sangat membantu penulis secara moril, dan mohon maaf jika tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, semoga Allah SWT terus menebarkan keberkahan kepada mereka semua.

Pekanbaru, 1 Juli 2021

Hormat,

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metodologi Penelitian | 11 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Profil Kejaksaan Negeri Pekanbaru | 20 |
| B. Tugas dan Fungsi Pokok Kejaksaan Negeri Pekanbaru | 20 |
| C. Visi, Misi dan Kode Etik Kejaksaan Negeri Pekanbaru | 23 |
| D. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru | 28 |
| E. Lambang dan Logo Kejaksaan Republik Indonesia | 30 |
| BAB III KAJIAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Pengertian Jaksa, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Pengacara Negara | 32 |
| B. Eksistensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara | 36 |
| C. Teori Negara Hukum | 41 |
| D. Teori Lembaga Negara | 48 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

| | |
|---|----|
| 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | |
| a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | |
| b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | |
| 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | |
| Teori Bantuan Hukum..... | 53 |
| Dasar Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara | 59 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum Sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru | 63 |
| B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum Sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru | 81 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 88 |
| B. Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

UIN SUSKA RIAU

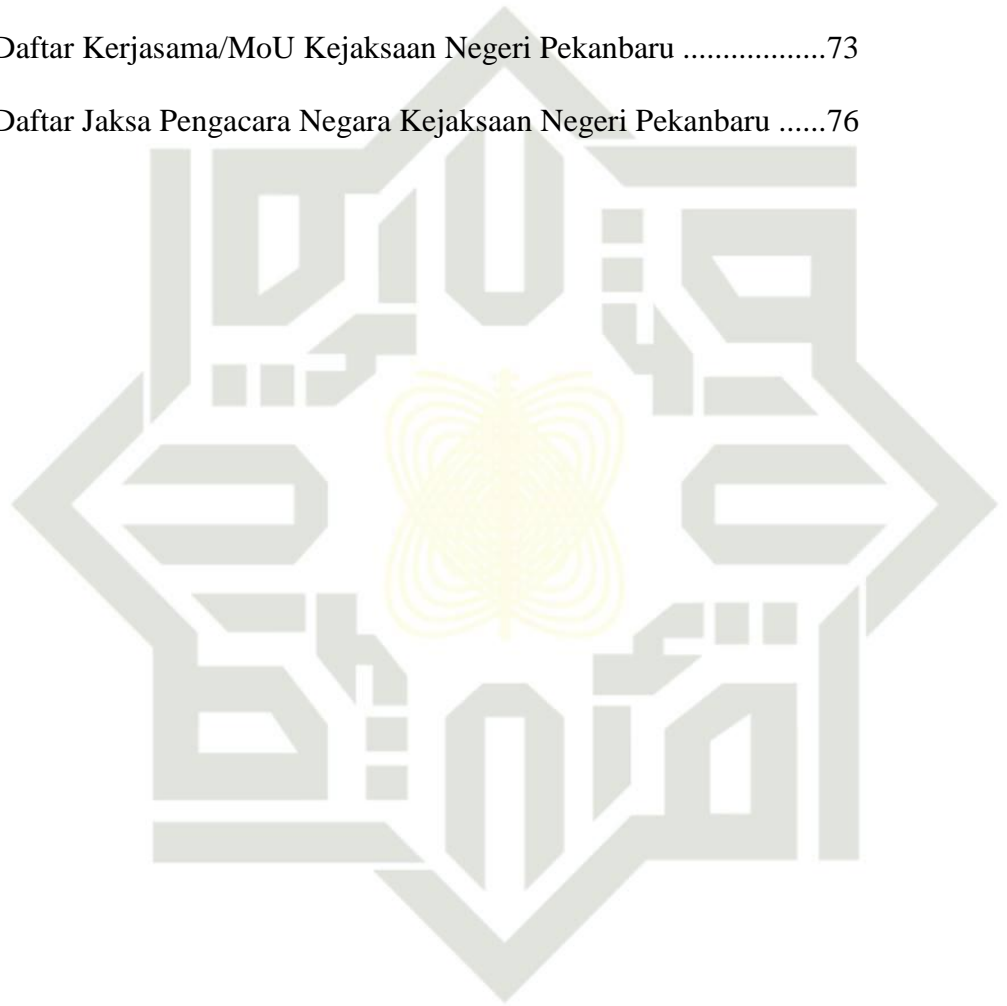


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel I.1 | Populasi dan Sampel..... | 15 |
| Tabel IV.1 | Laporan Tahunan Bantuan Hukum (Litigasi) Kejaksaan Negeri Pekanbaru..... | 70 |
| Tabel IV.2 | Daftar Kerjasama/MoU Kejaksaan Negeri Pekanbaru | 73 |
| Tabel IV.3 | Daftar Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru | 76 |



UIN SUSKA RIAU

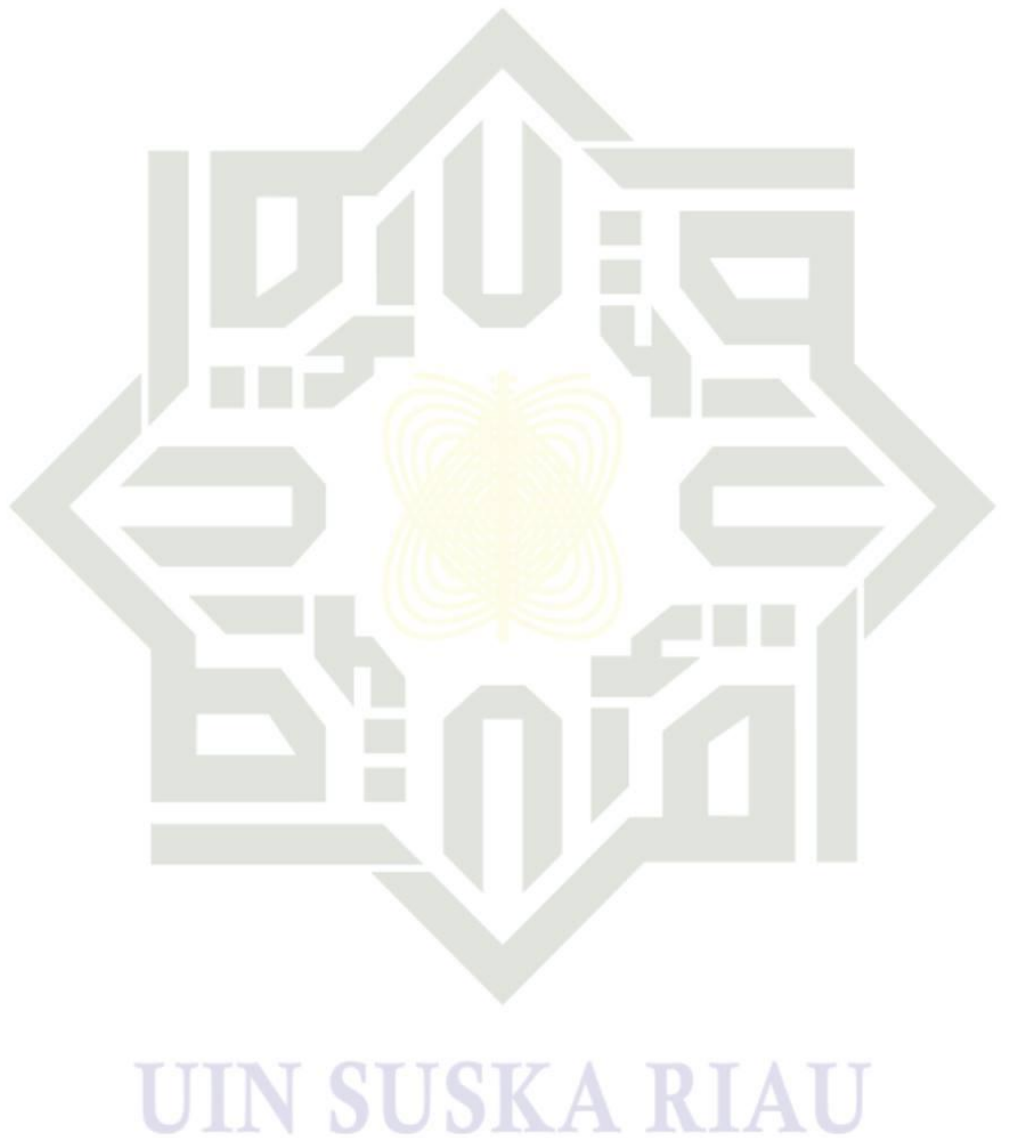


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|----|
| Gambar II.1 | Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bidang Datun | 28 |
| Gambar II.2 | Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru | 29 |





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum selalu terkait dengan istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep negara hukum *rechtsstaat* yang berkembang di Eropa Kontinental dipelopori antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*¹. Sedangkan konsep *the rule of law* berkembang di negara Anglo Saxon yang dipelopori oleh A.V. Dicey, prinsip *rule of law* yang berkembang di negara sistem hukum Anglo Saxon tersebut menjadi jargon *the rule of law, and not of man*, yaitu yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca perubahan, bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum³, artinya setiap

¹ Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) peradilan tata usaha negara. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 121-122.

² A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law*, yaitu: (1) *Supremacy of Law* (2) *Equality Before The Law* (3) *Due Process of Law*. Prinsip-prinsip konsep negara hukum *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh The International Commission of Jurists, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah (1) negara harus tunduk pada hukum, (2) pemerintah menghormati hak-hak individu, (3) peradilan yang bebas dan tidak memihak. *Ibid*.

³ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai hukum⁴. Menurut R.Djokosutomo bahwa negara hukum Indonesia adalah berdasarkan kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat⁵. Jadi, negara hukum atau negara berdasarkan hukum ialah negara yang pemerintahan, masyarakat dan rakyatnya dalam bertindak selalu mengedepankan dan menegakan hukum dengan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.⁶

Suatu negara yang hendak dipahami sebagai negara hukum, dalam kesatuan sistemnya harus terdapat (1) elemen kelembagaan (elemen institusional), (2) elemen kaedah aturan (elemen instrumental), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).⁷

keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Penggunaan istilah *rechtsstaat* telah dihapus dari undang-undang dasar sejalan dengan peniadaan unsur "penjelasan" setelah dilakukannya empat kali perubahan pada undang-undang dasar. Istilah resmi yang dipakai adalah seperti dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) "Negara Hukum" yang bisa menyerap substansi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus. MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan TAP MPR RI*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal RI, 2015), h. 68.

⁴ Nur Hidayat, "Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen ke Tiga". *UIR Law Review*. Vol. 01 No. 2, Oktober 2017, h. 196.

⁵ Hukumlah yang berdaulat, negara adalah merupakan subjek hukum dalam arti *rechtsstaat* (badan hukum republik), karena negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Dalam penjelasan UUD 1945, dikatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Oleh karena itu, negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum. Menurut Ismail Suny dalam broturnya "Mekanisme Demokrasi Pancasila", mengatakan bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur : (1) menjunjung tinggi hukum, (2) adanya pembagian kekuasaan, (3) adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya, (4) dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 86-87.

⁶ Astim Riyanto, *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, (Bandung : Yapemdo, 2006), h. 28.

⁷ Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman. (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Untuk mewujudkan konsep negara hukum sebagai sebuah cita-cita bangsa, maka diperlukan salah satunya yakni elemen kelembagaan (elemen institusional) di bidang peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau biasa disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*) yang melibatkan peran salah satunya yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Eksistensi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dijelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁸ Kewenangan lain tersebut dijelaskan dalam undang-undang yang sama Pasal 30 ayat (2), yang berbunyi :

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.⁹

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga hukum yang melaksanakan tindakan *pro justitia*. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dirumuskan, tugas dan kewenangan *pro justitia* kejaksaan meliputi tugas di bidang yustisial dan bidang non yustisial. Pada bidang yustisial, tugas jaksa adalah pemeriksaan pendahuluan,

(*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan (e) pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang. Kelima kegiatan tersebut dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (i) fungsi legislasi dan regulasi, (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta (iii) fungsi yudikatif atau judicial. Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparat penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, h. 296-297.

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1)

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 30 ayat (2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

meliputi : penyidikan, penyidikan lanjutan dan mengadakan pengawasan dan koordinasi alat-alat penyidikan lainnya. Sedangkan tugas non yustisial, antara lain adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan atau hal-hal lain yang berupa klausula terbuka, sepanjang dipandang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Misalnya: pelarangan buku-buku karangan Pramoedya Ananta Toer di masa Orde Baru, pembredelan koran, dan lain-lain.¹⁰

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat diartikan bahwa kejaksaan yang dalam hal ini ditujukan kepada Jaksa, dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik di luar maupun di dalam pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus, yaitu surat yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa.¹¹

Jaksa memiliki peranan penting di bidang hukum dalam proses pengadilan, baik sebagai penuntut umum maupun sebagai pengacara negara.¹² Istilah pengacara negara ditujukan kepada seorang Jaksa yang mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Jaksa Pengacara Negara atau Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara yang

¹⁰ Erwin Rompas, *Pengawasan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen Volume 1, April-Juni 2013, h. 67.

¹¹ Juristoffel Simanjuntak, *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)*, Jurnal Lex Administratum Volume VI Nomor 1, Januari-Maret 2018, h. 153.

¹² RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

meliputi, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.¹³

Salah satu tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata adalah tugas bantuan hukum, sebagaimana termaktub dalam pengertian umum poin 10 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bahwa :

“Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara non litigasi maupun litigasi di peradilan perdata serta arbitrase sebagai penggugat / penggugat intervensi / pemohon / pelawan / pembantah atau tergugat / tergugat intervensi / termohon / terlawan / terbantah, serta pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara dan pemerintah sebagai tergugat/termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil pemerintah atau menjadi pihak yang berkepentingan dalam perkara uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai termohon dalam perkara uji materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.”¹⁴

Eksistensi Jaksa Pengacara Negara semakin memiliki banyak peranan yang strategis dalam mata rantai penegakan hukum baik dalam mewakili kepentingan negara berdasarkan surat kuasa khusus, maupun melaksanakan fungsi terkait

¹³ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (1) dan (2)

¹⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015, No. 10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan hukum yang diberikan oleh berbagai ketentuan undang-undang.¹⁵ Terlebih lagi, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, pesatnya perkembangan hukum dalam dunia usaha, serta semakin memukanya peran negara di tengah kehidupan masyarakat, di situlah peran jaksa sebagai pengacara negara dituntut untuk mewakili negara atau pemerintah beracara perdata dalam rangka penyelamatan, pemulihan dan perlindungan keuangan atau kekayaan negara.

Namun, fungsi Jaksa sebagai Pengacara Negara di bidang perdata litigasi menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 belum banyak dikenal oleh lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Perdata Jaksa Jefry Armando Putra dan data laporan bantuan hukum (litigasi) yang penulis peroleh dari bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, bahwa terhitung mulai dari tahun 2017 hingga 2021 atau selama kurun waktu 5 tahun, hanya terdapat 11 (sebelas) perkara perdata litigasi yang telah ditangani oleh para Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru¹⁶.

Sedangkan jika dibandingkan dengan data dari direktori putusan web Pengadilan Negeri Kelas II Pekanbaru¹⁷, para lembaga/badan negara, instansi

¹⁵ Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 2017), h. 144.

¹⁶ Wawancara dengan Jefry Armando Putra, S.H., M.H., selaku Kasubsi Perdata dan Jaksa Pengacara Negara Kejari Pekanbaru, pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 11.00 WIB.

¹⁷ Kejaksaan Negeri Pekanbaru, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>, pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 11:37 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Pekanbaru seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara Pekanbaru (KPKNL), Kantor Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam beracara dipersidangan atau litigasi lebih banyak menggunakan jasa bantuan hukum dari lembaga firma hukum luar atau biro hukum dalam institusi tersebut dibandingkan menggunakan jasa bantuan hukum dari Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Padahal, Jaksa sebagai Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk menjadi kuasa hukum dalam menyelesaikan perkara perdata mewakili negara atau pemerintah guna menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pemanfaatan keberadaan Jaksa Pengacara Negara dalam praktik hanya menjadi wacana bagi lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penugasan Jaksa Pengacara Negara bukan hanya untuk mengamankan aset negara, tetapi juga untuk menjaga wibawa pemerintah dan aparat pemerintah.

Pemanfaatan secara lebih optimal terhadap tugas bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan keuntungan kepada sesama lembaga negara yaitu antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, yakni berupa penghematan pengeluaran negara atau daerah karena menggunakan kuasa hukum Jaksa Pengacara Negara adalah gratis, berbeda dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mengunakan jasa firma hukum luar yang dikenakan biaya. Selain itu, penggunaan jasa Jaksa Pengacara Negara oleh negara/pemerintah juga dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan efektivitas hukum, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada pelaksanaan hukum atau efektif tidaknya suatu hukum yang terjadi/beroperasi di masyarakat, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala tugas bantuan hukum perkara perdata litigasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (HTN), menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang eksistensi tugas bantuan hukum kejaksaan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS KEJAKSAAN DALAM HAL BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG PERDATA LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari ruang lingkup topik permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang tersebut adalah:
Bagaimana pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ?

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Akademis

Penelitian ini sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi .
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna ketika menghadapi permasalahan perdata dengan menggunakan jasa bantuan hukum kejaksaan sebagai pengacara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Jadi, metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹⁸

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Soerjono Soekanto¹⁹, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*).²⁰ Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini sebagai hasil interaksi antara hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lain, terutama sosiologi dan antropologi yang melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum.²¹ Kegunaan penelitian ini untuk melihat bagaimana hukum itu dilaksanakan, termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*), karena akan mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada pada pelaksanaan dan penegakan hukum.²²

Penelitian hukum sosiologis ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum, yaitu penelitian tentang pelaksanaan hukum atau efektif tidaknya suatu hukum yang terjadi/beroperasi dimasyarakat berupa pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.²³

¹⁹ *Ibid.*, h. 18.

²⁰ Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru : Suska Press, 2015), h. 112.

²¹ *Ibid.*, h. 114.

²² *Ibid.*, h. 116.

²³ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 31.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan beserta jalan dan kotanya. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Adapun lokasi penelitian tentang pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dilakukan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru bertempat di Jalan Jendral Sudirman No.295, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

²⁴ *Ibid.*, h. 105-106.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru berjumlah 1 orang, Kepala Sub Seksi Perdata Kejaksaan Negeri Pekanbaru berjumlah 1 orang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru berjumlah 1 orang, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau berjumlah 1 orang, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru berjumlah 1 orang dan Bank Negara Indonesia Cabang Arifin Ahmad Pekanbaru berjumlah 1 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.²⁶ Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.²⁷

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁸ Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan

²⁵ *Ibid.*, h. 98.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 125.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 85.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.²⁹

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

| No | Jenis Populasi | Populasi | Sampel | Persentase | Keterangan |
|----|---|----------|--------|------------|------------|
| 1. | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru | 1 | 1 | 100% | Wawancara |
| 2. | Kepala Sub Seksi Perdata Kejaksaan Negeri Pekanbaru | 1 | 1 | 100% | Wawancara |
| 3. | Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru | 1 | 1 | 100% | Wawancara |
| 4. | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau | 1 | 1 | 100% | Wawancara |
| 5. | Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru | 1 | 1 | 100% | Wawancara |
| 6. | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru | 1 | 1 | 100% | Wawancara |
| 7. | Bank Negara Indonesia Cabang Arifin Ahmad Pekanbaru | 1 | 1 | 100% | Wawancara |

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian, antara lain :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak

²⁹ Margono, *op.cit.*, h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber mengenai pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³¹ Adapun sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas atau bahan hukum yang bersifat *otoritatif* (mempunyai otoritas). Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:³²

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁰ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 106.

³¹ *Ibid.*

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan di bidang hukum.³³ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kegunaannya untuk memberi semacam petunjuk inspirasi kepada penulis, ke arah mana penulis akan melangkah.³⁴

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Simpatik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 29-33.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁵

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Pada penelitian ini, peneliti telah mewawancarai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala Sub Seksi Perdata Kejaksaan Negeri Pekanbaru, perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kota (BPN) Pekanbaru, perwakilan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, perwakilan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dan perwakilan Bank Negara Indonesia Cabang Arifin Ahmad Pekanbaru.

b. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.³⁶

³⁵ Zainuddin Ali, *loc cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata³⁷. Setelah data terkumpul dan dianalisis, selanjutnya penulis menjelaskan data-data tersebut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengemukakan data-data yang telah diperoleh, lalu dianalisis sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini, metode dengan pengumpulan seluruh data yang ada³⁸, setelah itu mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan kategori-kategori dan persamaan jenis, kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah ini dan diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

³⁶ *Ibid.*, h. 107.

³⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008),

³⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), h. 68.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Kejaksaan Negeri adalah kejaksaan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.³⁹ Kejaksaan Negeri Pekanbaru berkedudukan di Kota Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman No.295, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dipimpin oleh bapak Andi Suharlis, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Negeri dengan beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Kejaksaan Negeri Pekanbaru melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Tugas dan Fungsi Pokok Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Kejaksaan mempunyai beberapa tugas yaitu : melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan

³⁹ Peraturan Kejaksaan RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 952 (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.⁴⁰

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi:⁴¹

1. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
2. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
4. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim

⁴⁰ Kejaksaan Negeri Pekanbaru, "Tugas dan Fungsi Pokok Kejaksaan Negeri Pekanbaru", diakses dari <http://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/profile/tugaspokok>, pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 10:06 WIB.

⁴¹ Peraturan Kejaksaan RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 953

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri; pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴²

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa, karena kejaksaan berada diporos dan menjadi *filter* antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga kejaksaan

⁴² Kejaksaan Negeri Pekanbaru, "Tugas dan Fungsi Pokok Kejaksaan Negeri Pekanbaru", diakses dari <http://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/profile/tugaspokok>, pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 10:06 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.⁴³

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴⁴

C. Visi, Misi dan Kode Etik Kejaksaan Negeri Pekanbaru

1) Visi

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.⁴⁵

Misi

Misi Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu :⁴⁶

Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana penanganan perkara perdataan

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Kejaksaan Negeri Pekanbaru, "Visi Misi Kejaksaan Negeri Pekanbaru", diakses dari <http://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/profile/visimisi>, pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 09:17 WIB.

⁴⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tata usaha negara, serta nilai-nilai kepatuhan dalam rangka penegakan hukum.

Mewujudkan peran Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam hubungan internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara.

Mewujudkan aparatur Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

Melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program *quickwins* agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan aparatur Kejaksaan Negeri Pekanbaru jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, akan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI).

Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Kode Etik Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Kewajiban Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi yaitu :⁴⁷

⁴⁷ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, Pasal 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Jaksa harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini.
5. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
6. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran.
7. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Seorang Jaksa harus berpendirian terhadap dirinya sendiri tanpa gangguan dari orang lain dan tidak boleh takut dengan ancaman seseorang.
8. Bertindak secara objektif dan tidak memihak. Jaksa tidak boleh berpihak kepada salah satu tersangkat karena tersangkat masih ada hubungan dengan Jaksa.
9. Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban.
10. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.
11. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung.
12. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal.
12. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana.
13. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
14. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

b. Larangan Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi, yaitu :⁴⁸

1. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain. Dalam hal tersebut Jaksa tidak boleh menyalahgunakan pekerjaan tersebut dikarenakan Jaksa harus bersikap profesional.
2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Dalam menentukan dasar hukum yang akan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dalam proses penanganan perkara harus sesuai dengan fakta yuridis yang ada dan tidak boleh melakukan manipulasi atau memutar balikkan fakta yang berakibat melemahkan atau meniadakan ketentuan pidana yang seharusnya didakwakan dan dibuktikan.

⁴⁸ Ibid., Pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis. Larangan untuk melakukan penekanan dengan cara mengancam/ manakut-nakuti guna memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lainnya.
4. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Upaya untuk meminta dan/atau menerima walaupun tidak ada tindak lanjutnya berupa pemberian atau hadiah merupakan pelanggaran menurut ayat ini. Larangan untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan termasuk bagi keluarga, pada atau dari pihak tertentu dimaksudkan untuk menghindari adanya maksud-maksud tertentu sehingga dapat memengaruhi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjaga integritas Jaksa.
5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. Seorang Jaksa tidak boleh menangani suatu perkara di mana Jaksa tersebut memiliki hubungan keluarga, hubungan suami istri meskipun telah bercerai, hubungan pertemanan dan hubungan pekerjaan di luar menjalankan jabatan sebagai Jaksa dengan pihak yang sedang diproses, serta kepentingan finansial yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum yang sedang ditangani oleh Jaksa tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

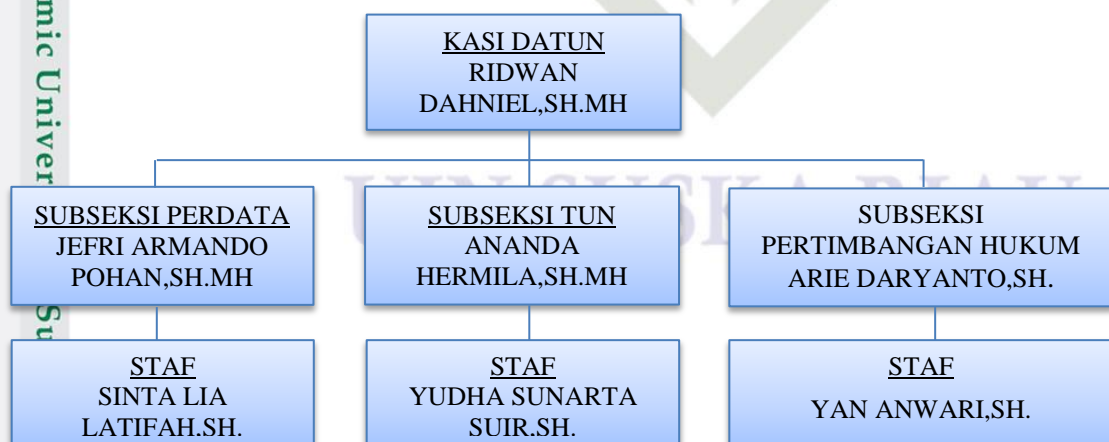
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apa pun. Jaksa dengan alasan apa pun tidak dibenarkan melakukan perbedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan atau pelanggaran hak hukumnya.
7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa semata-mata dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, terdapat hal yang tidak perlu diketahui oleh publik karena dapat berpengaruh pada proses penegakan hukum, untuk itu Jaksa tidak diperbolehkan membuat pernyataan yang dapat merugikan penegakan hukum kepada publik.
8. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

D. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Gambar II.1
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bidang Datun



Sumber : Kejaksaan Negeri Pekanbaru



© Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang

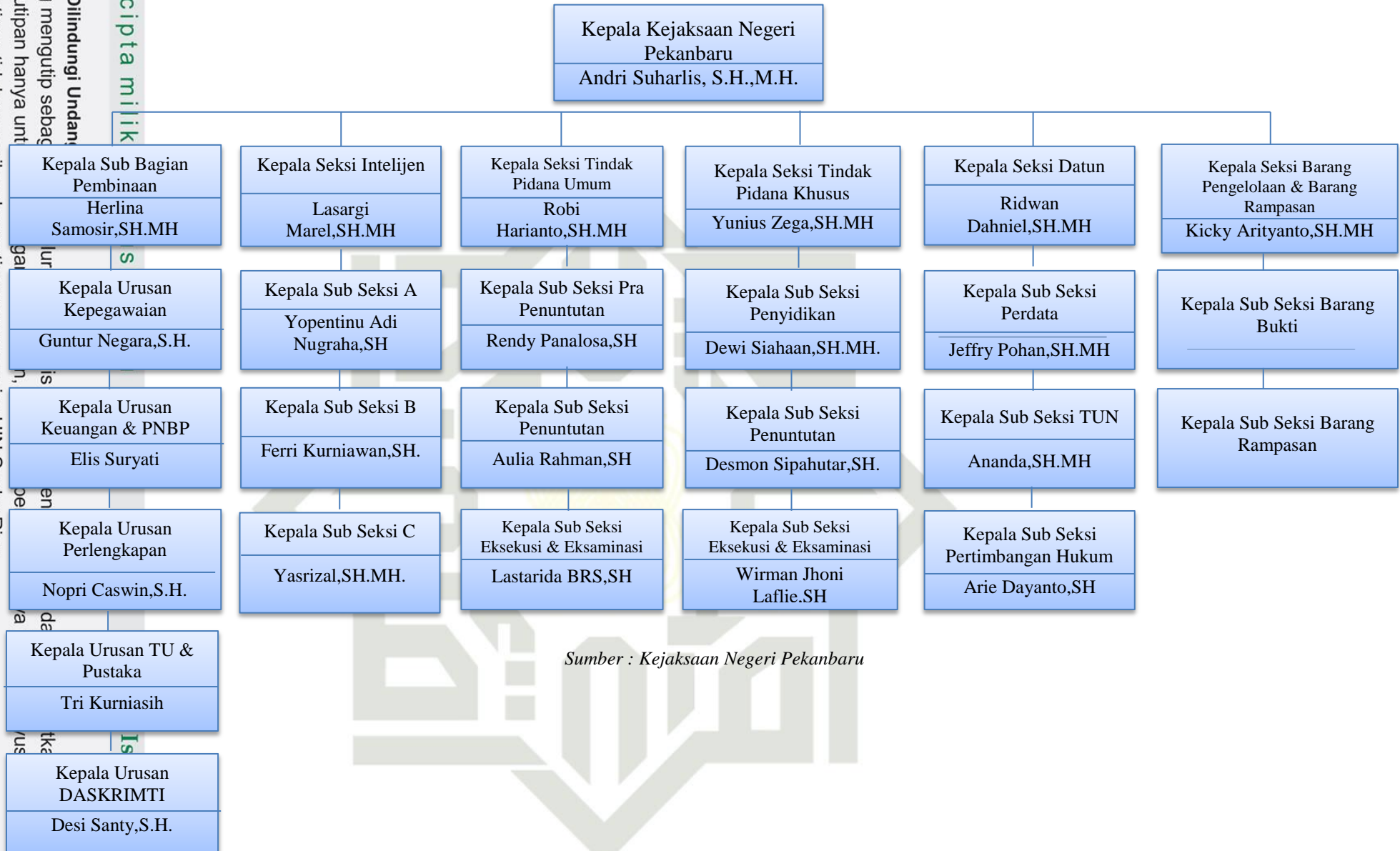
1. Dilarang mengutip sebag

a. Pengutipan hanya unt

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Gambar II.2
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Lambang dan Logo Kejaksaan Republik Indonesia



Lambang kejaksaan adalah gambar berupa sebatang tangkai padi dengan butir padi berjumlah 22 (dua puluh dua) buah, sebatang tangkai bunga kapas berjumlah 7 (tujuh) buah, dan sebilah pedang serta sebuah timbangan di antaranya, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Jaksa Agung mengenai Lambang Kejaksaan.⁴⁹

Logo kejaksaan adalah lambang Korps Adhyaksa yang berupa lambang kejaksaan ditambah tanda bintang berjumlah 3 (tiga) buah di bagian atas, dan pita bertuliskan seloka Satya Adi Wicaksana di bagian bawah.⁵⁰

Bintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi.

Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

⁴⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1(9)

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 1 (10)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

Seloka "Satya Adi Wicaksana"

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga adhyaksa dan mempunyai arti serta makna :⁵¹

- a. Satya diartikan kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adi diartikan sebagai kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana berarti bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Makna Tata Warna

- a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

⁵¹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-016/A/Ja/07/2013 tentang Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 5



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Jaksa, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Pengacara Negara

1. Jaksa

Secara terminologis, istilah Jaksa berasal dari kata *yaksa* dalam bahasa Sansekerta. Istilah ini dibawa dari India dan berpengaruh pada masa peradaban Hindu di Indonesia. Pada masa Majapahit, istilah *yaksa* digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *adhyaksa*, *dhyaksa*, dan *dharmaadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), *dhyaksa* merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan.¹

Jaksa (Sansekerta: *adhyaksa*; Inggris: *prosecutor*; bahasa Belanda: *officier van justitie*) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.²

Jaksa dalam pengertian umum adalah penuntut dalam suatu perkara. Jaksa dalam hal ini mewakili pemerintah, dan merupakan penjabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, disebutkan bahwa Jaksa adalah penjabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

¹ Sumanjaya, *Kejaksaan RI Dalam Lintasan Sejarah*, Majalah Hukum Kejaksaan RI, Jakarta, 2002.

² Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2018), h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁵⁴ Dalam Pasal 1 ayat (4) pada undang-undang yang sama dinyatakan bahwa, jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.⁵⁵

Peran Jaksa bukan hanya terkait dalam bidang pidana sebagai salah satu subsistemnya. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa tetap berperan sebagai wakil pemerintah, namun bukan sebagai penuntut umum tapi sebagai pembela bagi negara. Peran tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Tata Krama Adhyaksa, Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Etik Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.⁵⁶

2. Jaksa Penuntut Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bab IV Penyidik dan Penuntut Umum bagian ketiga Penuntut Umum Pasal 13 menyatakan bahwa, penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Jaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut :⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*, h. 33-34.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 20.

⁵⁶ Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, (Surabaya : Laksbang Justitia, 2014), h. 34.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 20-21.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

3. Jaksa Pengacara Negara

Dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat fungsi bidang perdata dan tata usaha negara. Khusus untuk bidang perdata, fungsi tersebut telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka dengan landasan hukum *staatblad* Nomor 522 Tahun 1922.⁵⁸ Para Jaksa yang bertugas mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata disebut “Pengacara Wakil Negara”. Namun pada akhirnya istilah ini berubah menjadi “Jaksa Pengacara Negara” dengan pertimbangan “Jaksa Wakil Negara” tidak menggambarkan adanya peran lembaga kejaksaan.⁵⁹

Menurut Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia,⁶⁰ istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan terjemahan dari “*land advocaat*” versi Pasal 3 *staatblad* 1922 Nomor 522 yang ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan kejaksaan mengistilahkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) sebagai Kantor Pengacara Negara. Pada masa orde lama, pemerintah mengangkat sejumlah Pengacara untuk menempati kedudukan sebagai Pengacara Negara. Kedudukan ini sama dengan peran *solicitor general* di

⁵⁸ *Ibid.*, h. 50.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 52.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 53.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Australia. *Solicitor-general* di Australia merupakan kantor sendiri dengan merekrut Pengacara profesional dan pelaksana bantuan hukum lainnya.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perkara perdata dan tata usaha negara. Sebutan Jaksa Pengacara Negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Justru secara formal, istilah Jaksa Pengacara Negara termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun demikian, istilah “Jaksa Pengacara Negara” sudah dipakai oleh lembaga kejaksaan sejak berdirinya unit kerja JAMDATUN pada tahun 1922.⁶¹

Sebagai kuasa dari instansi pemerintah atau BUMN, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan tidak semua Jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara, karena penyebutan itu hanya kepada Jaksa-Jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (DATUN).⁶²

Maka antara Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdapat perbedaan lingkup tugas dan kewenangannya. Jaksa Pengacara Negara melaksanakan kekuasaan negara pada perkara perdata dan tata usaha

⁶¹ *Ibid.*, h. 51-52.

⁶² *Ibid.*, h. 55.

negara, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada hakekatnya merupakan Jaksa yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam kasus atau perkara pidana.

B. Eksistensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara

1. Tugas Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara

Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan adalah dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁶³

Kejaksaan sebagai Pengacara Negara memiliki 5 tugas sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

1) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.⁶⁴

2) Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara non litigasi maupun litigasi di peradilan perdata serta arbitrase sebagai

⁶³ *Ibid.*, h. 165.

⁶⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggugat / penggugat intervensi / pemohon / pelawan / pembantah atau tergugat / tergugat intervensi / termohon/ terlawan / terbantah, serta pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara dan pemerintah sebagai tergugat / termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil pemerintah atau menjadi pihak yang berkepentingan dalam perkara uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai termohon dalam perkara uji materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.⁶⁵

3) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah, dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*/LO) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*/LA) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau audit hukum (*legal audit*) di bidang perdata.⁶⁶

4) Tindakan Hukum Lain

Tindakan hukum lain adalah pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/ kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid., h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar negara atau pemerintah.⁶⁷

5) Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum adalah pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi.⁶⁸

2. Fungsi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara

Adapun fungsi kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yaitu:

1) Menjamin Tegaknya Hukum

Maksud dari penegakan hukum adalah wewenang kejaksaan di bidang perdata untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.⁶⁹

Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2004 menerangkan, bahwa kejaksaan dapat bergerak di dalam maupun di luar pengadilan dengan surat kuasa khusus, tata bahasa di dalam pasal tersebut menerangkan seakan-akan instansi tersebut tidak dapat bergerak atau

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, h. 14.

⁶⁹ Juristoffel Simanjuntak, *op.cit.*, h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan fungsinya jika tidak ada surat kuasa khusus, dan Jaksa tidak dapat bergerak leluasa untuk menjalankan fungsi-fungsi kejaksaan.⁷⁰

2) Menyelamatkan Keuangan/Kekayaan Negara

Penyelamatan keuangan/kekayaan negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum atau pertimbangan hukum di bidang perdata yang diberikan kepada negara atau pemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum atau potensi adanya klaim/tuntutan dari pihak lain.⁷¹

3) Memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara

Pemulihan keuangan/kekayaan negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan penegakan hukum atau dalam memberikan bantuan hukum serta pertimbangan hukum di bidang perdata yang diberikan kepada negara atau pemerintah dalam rangka melindungi atau memulihkan keuangan/kekayaan negara.⁷²

4) Menjaga Kewibawaan Pemerintah

Penegakan kewibawaan pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum di bidang tata usaha negara dalam hal menghadapi gugatan penerbitan dan/atau dibatalkannya keputusan tata usaha negara, atau permohonan uji materiil undang-undang atau permohonan uji materiil peraturan di bawah undang-

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-025/A/JA/11/2015, *loc cit*.

⁷² Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang serta memberikan pertimbangan hukum kepada negara atau pemerintah dalam rangka menegakkan kewibawaan pemerintah.⁷³

Perkembangan masyarakat dewasa ini semakin berkembang, bukan hanya dalam pembangunan, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat semakin membaik. Masyarakat tak segan lagi untuk menggugat pemerintah, khususnya dalam hal keputusan tata usaha negara dapat digugat di dalam peradilan tata usaha negara, begitupun dalam hal keperdataan, hal yang dianggap merugikan masyarakat pun dapat digugat dengan peradilan perdata dalam Pengadilan Negeri. Dalam hal menjaga kewibawaan pemerintah, Kejaksaan hanya bersifat pasif. Hal mana seperti disebutkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan dapat bertindak dengan kuasa khusus bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara di bidang tata usaha negara dan perdata.⁷⁴

5) Melindungi Kepentingan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dalam melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus. Jadi, dalam membela kepentingan masyarakat Kejaksaan dapat bertindak karena jabatan dan kuasa khusus.⁷⁵

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Himpunan Petunjuk Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2010, h. 29.

⁷⁵ Juristoffel Simanjuntak, *loc cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan surat kuasa khusus, kejaksaan dapat bertindak dalam bidang perdata untuk dan atas nama masyarakat, sepihak kondisi seperti ini tidak memungkinkan satu persatu masyarakat menyerahkan surat kuasa khususnya kepada kejaksaan, kondisi seperti ini terakomodasi oleh konsep *class action*/ gugatan perwakilan kelompok, yakni suatu tata cara pengajuan gugatan, yang mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.⁷⁶

C. Teori Negara Hukum

Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles. Dalam bukunya “*Nomoi*”, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut dilanjutkan oleh muridnya Aristoteles, bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁷⁷

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan⁷⁸, yang diharapkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah

⁷⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Kelompok / *Class Action*, Pasal 1 huruf a

⁷⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 90-91.

⁷⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia : Sinar Bakti, 1983), h. 153.



nomina atau hukum. Sehingga, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.⁷⁹

Konsep negara hukum dianut oleh dua aliran besar, yaitu konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep negara hukum *rechtsstaat* dianut negara Eropa Kontinental seperti Belanda, yang dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan konsep negara hukum *the rule of law* yang dianut negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat, dikembangkan atas kepeloporan Albert Venn Dicey. Kedua konsep tersebut mengakui adanya supremasi hukum. Sedangkan perbedaannya adalah pada negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada peradilan yang sama. Sedangkan negara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.⁸⁰

Konsep negara hukum *rechtsstaat* lahir dari sebuah perjuangan menentang absolutisme, sehingga perkembangannya bersifat revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “*civil law*” atau “*modern roman law*”. Ciri negara hukum pada masa itu dilukiskan sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*), tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban umum dan keamanan (*the openbare order en veiligheid*).⁸¹ Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” mencakup empat elemen penting atau ciri, yaitu:⁸²

⁷⁹ Muhamad Jusuf, *op.cit.*, h. 70.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Marwan Effendy, *op.cit.*, h. 21.

⁸² Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. perlindungan hak asasi manusia;
2. pembagian kekuasaan;
3. pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. peradilan tata usaha negara.

Ciri-ciri diatas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.⁸³

Sedangkan paham *the rule of law* berkembang secara evolusioner sebagai usaha untuk melepaskan diri dari dari sistem absolutisme yang muncul sebagai reaksi terhadap absolutisme pemerintahan di Eropa, yang dikenal sebagai zaman *ancient regime*. Sehingga, secara historis isi inti dari paham *the rule of law* adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan kekuasaan raja harus berdasarkan hukum.⁸⁴ A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*the rule of law*”, yaitu.⁸⁵

1. Supremacy of Law

Artinya hukum diberi kedudukan yang tertinggi, hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak dapat dituntut apabila

⁸³ Ni'matul Huda, *op.cit.*, h. 82.

⁸⁴ Marwan Effendy, *op.cit.*, h. 16-17.

⁸⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar, 1962), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersalah, “*the state can do no wrong*”, yang dapat dituntut hanyalah manusianya. Dalam hal ini negara tidak dapat identikkan dengan pejabat negara; negara tidak dapat bersalah, yang mungkin bersalah hanyalah pejabat negara, dan dialah yang dihukum.⁸⁶

2. Equality Before The Law

Artinya, semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal baik sebab tidak ada rasdiskriminasi subjek hukum dalam hukum. Hal ini merupakan pencerminan dari pendirian liberalisme, individualisme, *freedom of individu* yang meliputi : kebebasan berpikir dan sebagainya.⁸⁷

3. Due Process of Law

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “*rules and procedures*” (regels).⁸⁸

⁸⁶ Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, h. 85.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 124-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

International Commission of Jurists yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 memperluas konsep mengenai *rule of law*, dan menekankan apa yang dinamakannya *the dynamic aspects of the rule of law in the modern age*. Bahwa, disamping hak-hak politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dipelihara, dalam arti bahwa harus dibentuk standar-standar dasar sosial dan ekonomi. Penyelesaian soal kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran merupakan syarat agar *rule of law* dapat berjalan dengan baik. Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* adalah :⁸⁹

1. perlindungan konstitusional;
2. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*);
3. pemilihan umum yang bebas;
4. kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. kebebasan untuk berserikat;
6. pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*rule of law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang.

Bagir Manan mengemukakan, ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat dan the rule of law*) yang mengandung esensi bahwa hukum adalah

⁸⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 115-116.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*), baik pada kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Prinsip negara berdasarkan atas hukum dijalankan baik pada negara kerajaan (Inggris, Belanda, Jepang, Malaysia, dan lain-lain) maupun pada negara republik (Amerika Serikat, India, Singapura, Perancis, Jerman, dan lain-lain).⁹⁰

Dalam kaitan dengan arti negara hukum, Bagir Manan dan Kuntana Magnar membaginya dalam arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, negara berdasarkan hukum adalah negara dimana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Sedangkan dalam arti khusus, negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹¹

Sedangkan M.Scheltema mengatakan bahwa setiap negara hukum mempunyai empat asas utama, yaitu *het rechtszekerheidsbeginsel* (asas kepastian

⁹⁰ Astim Riyanto, *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, (Bandung : Yademdo, 2006), h. 27-28.

⁹¹ *Ibid.*, h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum), *het gelijkheidsbeginsel* (asas persamaan), *het democratische beginsel* (asas demokrasi) dan *het beginsel van de dienende overheid, government for the people* (asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat).⁹² Kepastian hukum dapat diwujudkan apabila antara lain terdapat kemerdekaan dan independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kemerdekaan dan independensi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.⁹³

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ada 12 ciri penting dari negara hukum, yaitu :⁹⁴

1. supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3. asas legalitas (*due process of law*);
4. pembatasan kekuasaan;
5. organ-organ eksekutif independen;
6. peradilan bebas dan tidak memihak;
7. peradilan tata usaha negara;
8. peradilan tata negara (*constitutional court*);
9. perlindungan hak asasi manusia;
10. bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*);

⁹² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung : Pusat Penerbitan Univ. LPPM UNISBA, 1995), h. 5.

⁹³ Marwan Effendy, *op.cit.*, h. 25.

⁹⁴ Arie Purnomosidie, *Tesis : "Negara Hukum Pancasila (Analisis Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pra dan Pasca Amandemen)"*, (Salatiga : UKSW, 2012), h. 117.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);

12. transparansi dan kontrol sosial.

Jadi, negara hukum atau negara berdasarkan hukum ialah negara yang pemerintahan, masyarakat, dan rakyatnya dalam bertindak selalu mengedepankan dan menegakkan hukum dengan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

D. Teori Lembaga Negara

Kata lembaga negara berasal dari serapan kata “*staatsorgan*” dalam bahasa Belanda atau “*political institutions*” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia identik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara.⁹⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” memiliki beberapa arti salah satu arti yang paling relevan dengan penelitian ini ialah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Kamus tersebut juga memberi contoh frase yang menggunakan kata lembaga, yaitu “lembaga pemerintah” yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif.⁹⁶

Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia, kata “*staatsorgan*” diterjemahkan sebagai “alat perlengkapan negara”. Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, kata “organ” juga diartikan sebagai “perlengkapan”. Karena itu, istilah lembaga negara, organ

⁹⁵ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), h. 1.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya penyusun UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara. Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.⁹⁷

Secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut ornop atau Organisasi Non-Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organizations (NGO's). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁹⁸

Hans Kelsen mengenai *the concept of the state organ* dalam bukunya "General Theory of Law and State", mengemukakan bahwa "*whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*". Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Selain organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi setiap jabatan yang dikemukakan oleh hukum

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 28.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dapat juga disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). Hans Kelsen juga menguraikan pengertian organ negara dalam arti sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (...he personally has a specific legal position).⁹⁹

Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur dalam konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya (*check and balances*). Menurut A. Hamid Attamimi, dalam buku Azyumardi Azra menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.¹⁰⁰ Secara umum, konstitusi dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip dalam kehidupan bernegara yaitu salah satunya adanya pembagian kekuasaan berdasarkan *trias politica* dan adanya kontrol serta keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.¹⁰¹ Pemahaman mengenai organ negara dikenal dengan *trias politica* yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan

⁹⁹ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung : Refika Aditama, 2020), h. 8.

¹⁰⁰ Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 72.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi.¹⁰²

Secara umum, alat-alat perlengkapan negara pada pokoknya dapat diklasifikasikan menjadi (1) organ yang bersumber langsung dari konstitusi dan (2) organ yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (*derivative*). Kedua jenis organ tersebut ada yang berwenang membentuk organ (alat kelengkapan negara) lainnya, tetapi ada pula yang tidak diberi hak untuk itu. Ada lembaga yang harus independen dan ada pula yang memiliki keterkaitan fungsional.¹⁰³

Bagir Manan mengategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni :¹⁰⁴

- a. Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti lembaga kepresidenan, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.

Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan.

Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.

¹⁰² Zaky Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, (Langsa : Universitas Samudra, 2019), h. 7-8.

¹⁰³ Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), h. 63-64.

¹⁰⁴ Novianto M. Hantoro, "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, November 2016, h. 148.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Menurut Jimly Asshiddiqie dari segi hirarkinya, lembaga negara terbagi menjadi 3 lapis yakni : lapis pertama disebut sebagai “lembaga tinggi negara”, lapis kedua disebut sebagai “lembaga negara” dan lapis ketiga disebut dengan “lembaga daerah”. Dengan demikian, maka tidak ada lagi istilah “lembaga tertinggi negara” dan “lembaga tinggi negara”.¹⁰⁵

Pada lapis pertama, yang disebut lembaga negara dalam UUD 1945 yakni; Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK.

- b. Pada lapis kedua, lembaga negara ini ada yang mendapat kewenangan dari UUD (misalnya KY, TNI, Kepolisian Negara, KPU, Bank Sentral dan Menteri Negara). Lembaga-lembaga tersebut ada yang ditentukan secara tegas baik nama maupun kewenangannya dalam UUD 1945, namun ada pula yang kewenangannya ada tetapi namanya tidak ada (misalnya KPU). Selain itu ada pula lembaga negara yang mendapat kewenangan dari UU (misalnya : Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dsb).

Pada lapis ketiga, merupakan organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah UU (misalnya : Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional, dsb).

¹⁰⁵ Made Nurmawati,dkk, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Fakultas Hukum Unud : Denpasar, 2017), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 maka ada pula yang disebut dengan “lembaga daerah”, yakni merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga tersebut adalah ; pemerintah daerah provinsi yakni Gubernur dan DPRD provinsi; Pemerintah Daerah kabupaten yakni DPRD Kabupaten dan Bupati; serta Pemerintah Daerah Kota, yakni Walikota dan DPRD Kota. Lembaga-lembaga daerah tersebut disebut secara eksplisit dalam UUD 1945. Disamping itu ada pula lembaga daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰⁶

Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya mencakup mengenai kewenangan dan hubungan antar lembaga negara. Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara dan fungsi pemerintahan.¹⁰⁷

E. Teori Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin untuk mendapatkan perwakilan hukum dan di pengadilan baik litigasi maupun

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid., h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

non-litigasi.¹⁰⁸ Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara :¹⁰⁹

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerimaan bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara.

Sedangkan bantuan hukum non-litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Para Legal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.¹¹⁰ Dalam konteks bantuan hukum secara non-litigasi, ialah sebagai pendamping masyarakat, memberikan pertolongan pertama apabila terjadi pelanggaran hukum seperti melakukan pendampingan, mendidik dan melakukan penyadaran hukum, mendorong masyarakat mengajukan tuntutan.¹¹¹

Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi meliputi kegiatan :¹¹²

¹⁰⁸ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), h. 258.

¹⁰⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

¹¹⁰ Febri Handayani, *op.cit.*, h. 260.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 259-260.

¹¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

penyuluhan hukum;
 konsultasi hukum;
 investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik;
 penelitian hukum;
 mediasi;
 negoisasi;
 pemberdayaan masyarakat;
 pendampingan di luar pengadilan dan/atau;
 drafting dokumen hukum.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh lokarya bantuan hukum tingkat nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum yang merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi : pembelaan; perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan; pendidikan ; penelitian; dan penyebaran gagasan.¹¹³

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu :¹¹⁴

penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
 bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luar proses persidangan;

¹¹³ Ibid., h. 3.

¹¹⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata maupun tata usaha negara;

bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Ruang lingkup bantuan hukum pada umumnya yang diberikan adalah :¹¹⁵

Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita, dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya.

Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwa sedang akan diperiksa oleh pengadilan.

3. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.

Pada dasarnya, baik Eropa maupun di Amerika terdapat dua model (sistem)

bantuan hukum, yaitu¹¹⁶ :

Ajuridicial Right (model yuridis-individual)

Model *ajuridicial right* menekankan pada sifat individualistis. Sifat individualistis ini maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Welfare Right (model kesejahteraan)

Sistem hukum di Amerika Serikat agak berbeda. Bantuan hukum di Amerika Serikat berada dibawah pengaturan *criminal justice act and economic opportunity act*. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan hukum sebagai

¹¹⁵ Febri Handayani, *op.cit*, h. 18.

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

hak untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Pembatasan pemberian bantuan hukum terbatas pada advokat dengan sendirinya akan bertentangan dengan peraturan yang telah ada, karena di dalam peraturan perundangan tersebut diidentifikasi pemberi bantuan hukum yaitu :¹¹⁷

Advokat/penasehat hukum

Posbankum

LBH

Pekerja sosial/pendamping

Selain bantuan hukum yang pada umumnya dilakukan oleh para Advokat, bantuan hukum juga dapat diberikan oleh pihak kejaksaan. Bantuan hukum yang dimaksudkan adalah bantuan hukum yang diberikan kepada instansi negara atau instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD atau pejabat tata usaha negara, di dalam perkara perdata dan tata usaha negara yang didasarkan atas surat kuasa khusus (SKK). Bantuan hukum tersebut diberikan baik di dalam maupun luar pengadilan (misalnya melalui negoisasi, mediasi dan faslitiasi), baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.¹¹⁸

Berbeda dengan konsep bantuan hukum yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum¹¹⁹, bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, maupun definisi

¹¹⁷ AUSAID,dkk, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 37-39.

¹¹⁸ Muhammad Jusuf, *op.cit.*, h. 170.

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.¹²⁰ Teori bantuan hukum yang diberikan Kejaksaan tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, melainkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Teori bantuan hukum yang dimaksud, diberikan oleh Kejaksaan kepada lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pada hakekatnya, setiap permintaan bantuan hukum yang dimintakan oleh lembaga atau instansi pemerintah dan atau BUMN/BUMD dapat diterima oleh Kejaksaan untuk diberikan bantuan hukum. Namun demikian, terhadap persoalan yang berkaitan dengan perbuatan pidana dan perbuatan pribadi pejabat pemerintah yang bersangkutan, maka Kejaksaan tidak dapat memberikan bantuan hukum tersebut.¹²¹

Menurut instruksi Jaksa Agung Nomor:INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum, diketahui bahwa pemberian bantuan hukum harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :¹²²

Terhadap sering permintaan bantuan hukum, dibuat telaahan yang memuat analisa hukum yang lengkap guna mengantisipasi kasus yang bersangkutan.

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 angka 9

¹²¹ Muhammad Jusuf, *loc.cit.*

¹²² *Ibid.*, hlm. 170-171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kenyataan hukum diajukan setelah perkara perdata tersebut berjalan. Telaahan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dimana kekuatan, kelemahan, dan peluang menghadapi perkara tersebut.

Intansi pemerintah atau lembaga negara di luar kejaksaan dalam kedudukannya sebagai tergugat atau penggugat, dapat memberikan kuasa kepada kejaksaan di tempat kedudukan tergugat atau penggugat.

Dalam hal menjadi tergugat atau penggugat adalah Presiden, Menteri atau Pejabat Negara yang setingkat Menteri, surat kuasa khusus dengan hak substitusi diberikan kepada Jaksa Agung RI, atau Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara. Terhadap pejabat lainnya ditingkat pusat diberikan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk tingkat daerah diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri.

F. Dasar Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara

Secara historis, tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pengacara Negara di bidang perdata telah dikenal sejak tahun 1922 (*vide Staatblad* 1922 No.522, *Vertegenwoordigevan den lande in Rechten*). Keberadaan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) merupakan bentuk upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara yang bertujuan memulihkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.¹²³

¹²³ Bambang Setyo Wahyudi, *Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan JAMDATUN*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 247.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan, tugas dan fungsi kejaksaan bidang perdata diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni :¹²⁴

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diatur dalam :
 - a. Pasal 30 ayat (2) :
“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.
 - b. Pasal 34
“Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya”.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia jo. Perpres Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, diatur dalam :
 - a. Pasal 24 ayat (1)
“Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara”.
 - b. Pasal 24 ayat (2)
“Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

¹²⁴ Ibid., h. 249-252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, di samping memberikan wewenang kepada JAMDATUN untuk melaksanakan fungsi perdata dan tata usaha negara yang merupakan bagian dari struktur dan sistem Kejaksaan Agung, kepada kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara juga diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang meliputi penegakan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 009/A/JA/01/2011 telah mengalami perubahan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 006/A/JA/03/2014 tentang perubahan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 000/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 292, 293 dan 294.
 - a. Pasal 292
 - (1) *Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) *Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.*
- b. Pasal 293
 - (1) *Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;*
 - (2) *Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.*
- c. Pasal 294
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :
 - a. *perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;*
 - b. *pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;*
 - c. *koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;*
 - d. *pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;*
 - e. *pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara;*
 - f. *pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.*



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru belum berjalan maksimal. Hal tersebut diketahui dari jumlah perkara perdata yang ditangani atau yang menggunakan jasa bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dari tahun 2017-2021 yakni selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, adalah hanya terdapat 11 (sebelas) perkara. Jumlah tersebut tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan banyaknya animo lembaga pemerintah/BUMN/BUMD Pekanbaru yang selama ini beracara (litigasi) di Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun tidak menggunakan jasa bantuan hukum Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, melainkan menggunakan kuasa hukum dari firma luar ataupun kuasa hukum dari biro hukum lembaga pemerintah/BUMN/BUMD tersebut masing-masing. Hal tersebut diketahui dari web direktori putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru bagian perdata, yang menunjukan antusias lembaga pemerintah/BUMN/BUMD Pekanbaru dalam beracara di pengadilan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan jasa bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara sangat tinggi. Padahal, banyak keuntungan atau manfaat yang akan didapatkan oleh para lembaga pemerintah/BUMN/BUMD Pekanbaru dengan menggunakan jasa Pengacara Negara berupa bantuan hukum (litigasi) dalam penyelesaian perkara di bidang perdata yang dihadapi.

Adapun faktor penghambat dari tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu: 1) Rata-rata para lembaga pemerintah/BUMN/BUMD Pekanbaru masih tidak memahami dan mengetahui fungsi kejaksaan dalam bidang penanganan perdata; 2) Tidak familiarnya kewenangan Jaksa Pengacara Negara atau tugas bantuan hukum kejaksaan sebagai Pengacara Negara dikalangan lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD Kota Pekanbaru; 3) Masing-masing lembaga rata-rata sudah memiliki biro hukum tersendiri untuk mewakili kepentingan lembaga tersebut; 4) Ada rasa segan dari lembaga pemerintah/BUMN/BUMD untuk menggunakan Pengacara Negara dalam mewakili kepentingannya; 5) Kendala dari interen lembaga kejaksaan; 6) Kendala dari ekstern lembaga kejaksaan, dalam perangkat perundang-undangan; 7) Belum adanya secara tegas suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara yang diharuskan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdata pada perseorangan/badan usaha; 8) Adanya kekhawatiran lembaga atau instansi pemerintah, perseorangan masyarakat



maupun badan hukum untuk menyerahkan kuasa khusus kepada Kejaksaan;

9) Penggunaan jasa Pengacara Negara kejaksaan tidak bersifat *mandatory* atau kewajiban, melainkan *optional* atau pilihan.

B. Saran

Untuk terlaksananya tugas bantuan hukum kejaksaan sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru melalui unit Datun, agar gencar dalam melakukan upaya pendekatan dan sosialisasi hukum terhadap setiap lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Pekanbaru, dalam rangka memperkenalkan tugas bantuan hukum kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan melakukan kerja sama atau MoU.
2. Kepada para lembaga pemerintah/BUMN/BUMD yang ada di Pekanbaru, agar menggunakan jasa bantuan hukum pengacara negara kejaksaan secara litigasi di bidang perdata dalam membela kepentingannya di Pengadilan guna menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara dan menegakan kewibawaan pemerintah.
3. Kepada lembaga legislatif, dari sisi yuridis fungsi Jaksa dapat mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata, landasan hukumnya sudah kuat, akan tetapi status dan istilah Jaksa sebagai Pengacara Negara masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

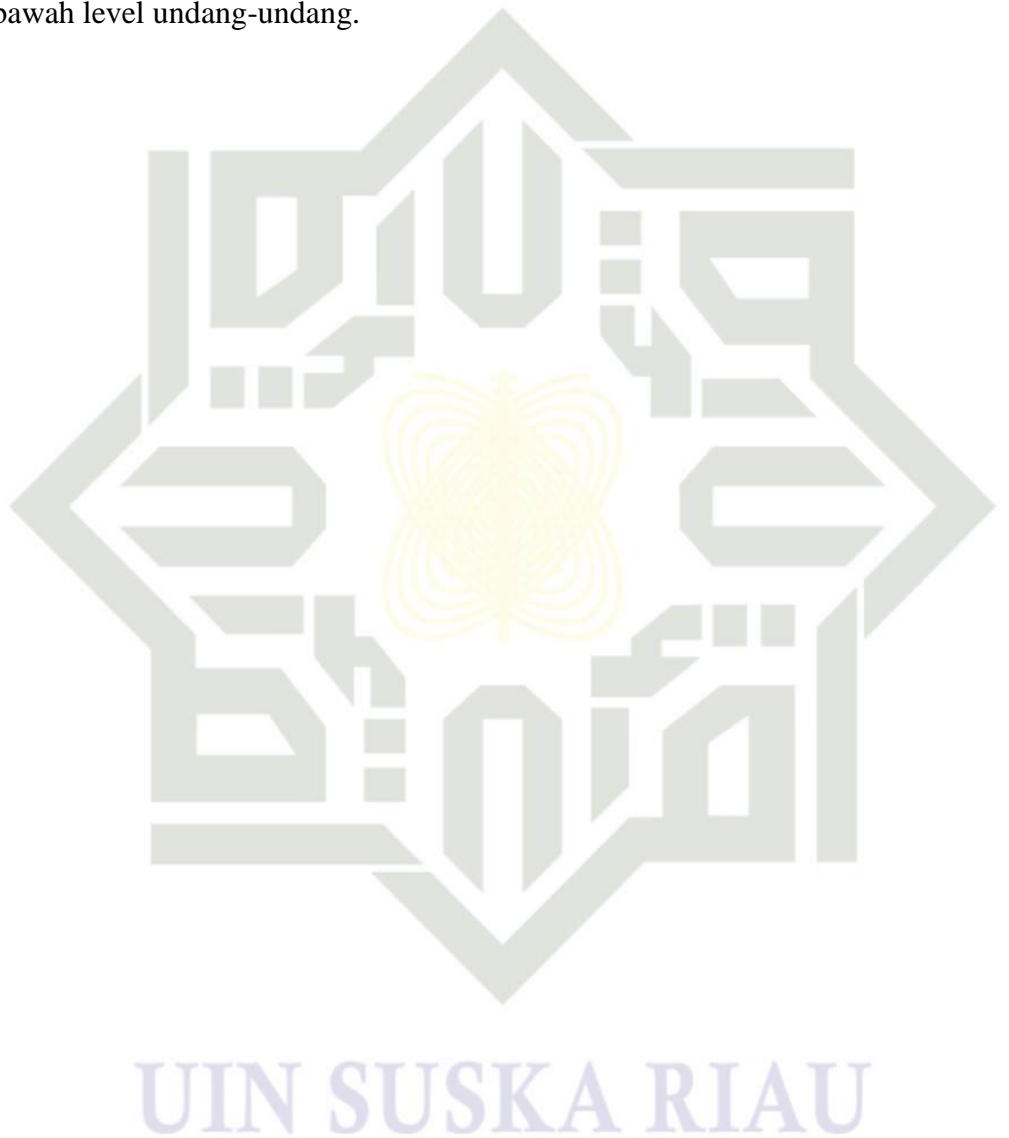
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memerlukan landasan hukum yang lebih kuat setingkat undang-undang. Sehingga, diperlukan undang-undang khusus tentang Pengacara Negara dalam kerangka reformasi hukum. Karena, secara yuridis peraturan perundang-undangan tentang eksistensi Jaksa Pengacara Negara (JPN) masih di bawah level undang-undang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Gunung Agung.
- Ahmad Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- AUSAID,dkk. 2008. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat. 2008. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Busrroh, Abu Daud. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Ekawati, Evy Lusia. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta : Genta Press.
- Ferrianty,Yenny. 2020. *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Hajar. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru : Suska Pers.
- Hamzah, Andi. *Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Seminar Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 20 Juli 2000.
- Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Kalimedia.
- Himpunan Petunjuk Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN). 2010. XXII. Jakarta : Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- HS, Salim. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____. 2017. *Ilmu Negara*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, UU Nurul. 2020. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung : Refika Aditama.
- Isharyanto. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta : Deepublish.
- Junaidi, Muhammad. 2018. *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta : Suluh Media.
- Jusuf, Muhamad. 2014. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Surabaya : Laksbang Justitia.
- Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Layrence,M.Friedman. 2013. *The Legal System a Social Science Perspective* (Terjemahan M.Khosin). Bandung : Nusamedia.
- Made Nurmawati,dkk. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Fakultas Hukum Unud : Denpasar.
- Manan, Bagir. 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung : Pusat Penerbitan Univ. LPPM UNISBA.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Maringka, Jan.S. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia : Sinar Bakti.
- MPR RI. 2015. *Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan TAP MPR RI*. Jakarta : Sekretariat Jenderal RI.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers.
- Nurtjahjo, Hendra. 2005. *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Rifai, Achmad. 2020. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makasar : Nas Media Pustaka.
- Riyanto, Astim. 2006. *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Bandung : Yapemdo.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supadibroto. 1994. *Profil Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara*. Jakarta : Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Sumanjaya. 2002. *Kejaksaan RI Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta : Majalah Hukum Kejaksaan RI.
- Supachman dan Jan S.Maringka. 2015. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ulfa, Zaky. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Langsa : Universitas Samudra.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Ichtiar.
- Wahyudi, Bambang Setyo. 2017. *Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Wiharta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Yamin, Muh. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid Pertama.
- Arif Purnomosidie, Tesis : “*Negara Hukum Pancasila (Analisis Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pra dan Pasca Amandemen)*”. Salatiga : UKSW, 2012.
- Hidayat, Nur. 2017. *Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen ke Tiga*. UIR Law Review, 1(2), 196.
- Novianto M., “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, November 2016.
- Rompas, Erwin. 2013. *Pengawasan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHP*. Lex Crimen Volume 1, April-Juni, 67.
- Simanjuntak, Juristoffel. 2018. *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)*. Lex Administratum, 6(1), 153.
- Yasin, Sulchan. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amanat.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Kelompok/
Class Action.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007
tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-016/A/Ja/07/2013 tentang
Urutan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,
Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Negeri Pekanbaru,"Visi Misi Kejaksaan Negeri Pekanbaru", diakses
dari <http://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/profile/visimisi>, pada tanggal
6 Februari 2021 pukul 09:17 WIB.

Kejaksaan Negeri Pekanbaru, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia", diakses dari
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>, pada tanggal 18
Februari 2020 pukul 11:37 WIB.

Kejaksaan Negeri Pekanbaru,"Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru",
diakses dari <http://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/profile/struktur>, pada
tanggal 5 Maret 2021 pukul 03:56 WIB.

Kejaksaan Negeri Pekanbaru,"Tugas dan Fungsi Pokok Kejaksaan Negeri
Pekanbaru", diakses dari <http://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/profile/tugaspokok>, pada tanggal 27 Mei 2021
pukul 10:06 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akan-dihilangkan/>, diakses pada 6 Juni pukul 2.42 WIB.

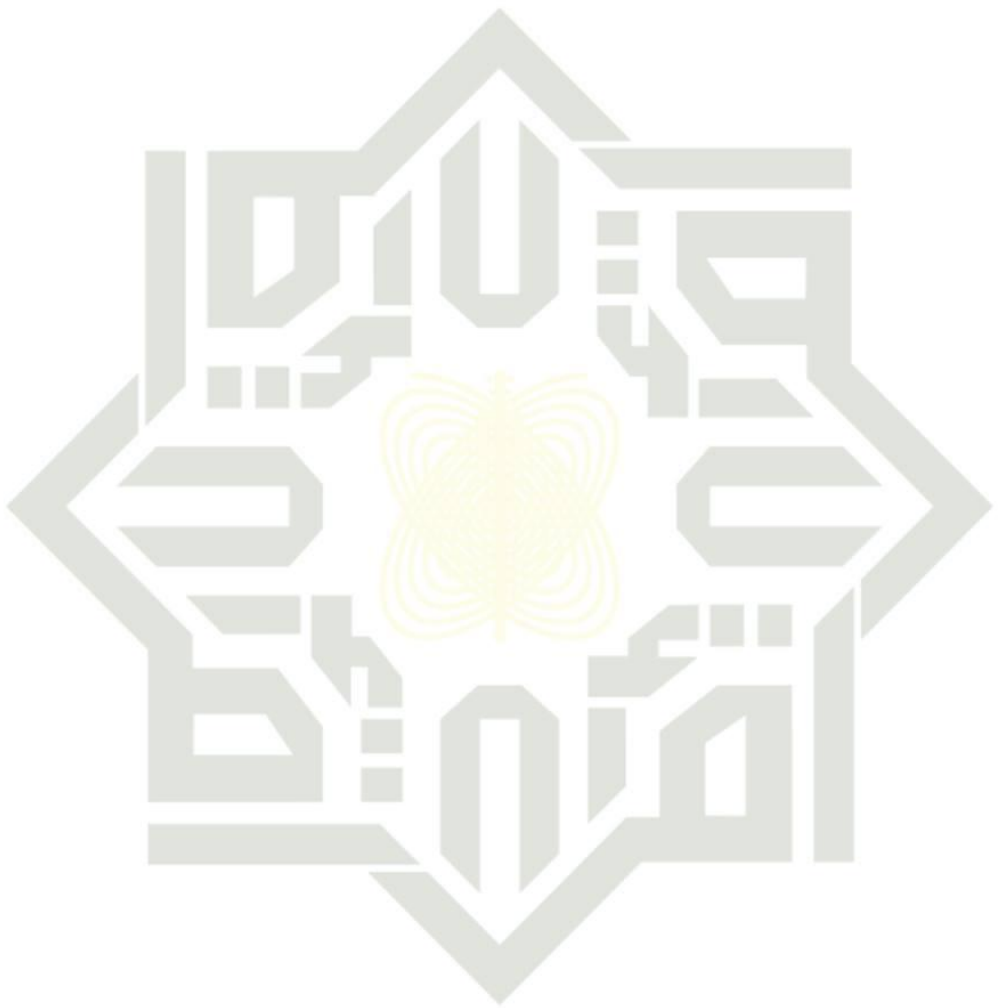
<https://www.goriau.com/berita/baca/ekonomi-lesu-ini-daftar-bumd-milik-pemprov-riau-yang-sehat-dan-sakit.html> , diakses pada 7 Juni 2021 pukul
02:56 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.daftarperusahaan.com/area/pekanbaru?page=7>, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 03:06 WIB.

<https://www.riau.go.id/home/skpd/partisipasi>, diakses pada 7 Juni 2021 pukul 04:31 WIB.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah ada lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang mengadakan kerja sama/MoU kepada pihak Kejaksaan di bidang perdata khususnya ?
2. Lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD apa saja yang mengadakan kerja sama/ MoU kepada pihak Kejaksaan di bidang perdata khususnya ?
3. Dalam bentuk kerja sama seperti apa antara lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD dengan pihak Kejaksaan biasanya ?
4. Berapa lama telah menjabat sebagai jaksa pengacara negara ?
5. Berarti bapak sebagai Kepala bidang DATUN juga sebagai JPN atau hanya kepala bidang DATUN saja ?
6. Berapa jumlah perkara yang ditangani JPN Kejaksaan Negeri Pekanbaru selama 5 tahun terakhir ?
7. Selama menjadi JPN, sudah berapa perkara yang ditangani secara litigasi sampai ada putusan hakim?
8. Biasanya perkara perdata yang ditangani perkara seperti apa?
9. Melihat animo lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD lainnya yang kurang antusias dalam penggunaan jasa bantuan hukum secara litigasi yang diberikan oleh Kejaksaan berupa JPN, menurut ibu/bapak apa faktor penghambatnya ?
10. Padahal Kejaksaan diberi wewenang untuk menjadi kuasa hukum lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD dalam pasal 30 (2) UU No. 16 Tahun 2004 dalam rangka penyelamatan keuangan/kekayaan negara, pemulihan keuangan dan menjaga wibawa pemerintah, selain itu dapat menambah pemasukan negara melalui pendapat negara bukan pajak oleh Kejaksaan, kenapa masih jarang lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD lainnya yang menggunakan jasa bantuan hukum JPN secara litigasi ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Apa benefit yang didapatkan apabila lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD lainnya menggunakan jasa bantuan hukum JPN ? Apakah ada perbedaan dengan firma hukum luar ?
12. Dalam pasal 30 (2) UU No. 16 Tahun 2004 dijelaskan tentang kewenangan jaksa dibidang perdata, dan detail diatur dalam PERJA Nomor:PER-025/A/JA/11/2015, itu sifatnya memaksa apabila lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD tidak menggunakan JPN akan dikenakan sanksi, atau hanya berupa anjuran atau seperti apa sifatnya ?
13. Berdasarkan direktori putusan web Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas II di bidang perdata yang saya telusuri, banyak lembaga instansi pemerintah/BUMN/BUMD seperti BPN, Bank BRI, KPKNL yang beracara di pengadilan, namun kuasa hukumnya tidak ada yang dari JPN. Kemarin saya pergi ke BPN, karena BPN lembaga yang paling banyak beracara di pengadilan, dan penjelasan mereka, mereka punya sub seksi penanganan sengketa, konflik dan perkara, jadi orang-orang di sub seksi ini yang membela kepentingan BPN dalam beracara, karena posisinya sama kayak JPN, jadi tidak perlu JPN lagi, begitu penuturannya. Itu bagaimana pak/buk ? Apakah itu jadi salah satu faktor ? Apakah itu diperbolehkan ? Apakah benar posisinya sama seperti JPN ?
14. Apakah definisi bidang advokasi yang dimiliki oleh lembaga negara/BUMN/BUMD sama definisinya dengan firma hukum ?
15. Bagaimana SDM JPN di kejaksaan ini ?
16. Bisa ceritakan tentang pengalaman dalam menangani kasus perdata ?
17. Bagaimana/apa peran JPN di bidang perdata ?
18. Apakah perlu jaksa memiliki kewenangan sebagai pengacara negara ?
19. Apakah bisa lembaga yang tidak mengadakan MoU meminta jasa JPN ?
20. Bagaimana independensi seorang JPN dalam menjalankan fungsinya memberikan jasa bantuan hukum, misalnya kejaksaan sebagai lembaga pemerintah digugat secara perdata, apakah tidak terjadi *conflict of interest* disini, atau barangkali kejaksaan akan menyewa advokat dari firma hukum luar ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

21. Sedikitnya perkara perdata yg masuk dikejaksaan, apakah memang banyak lembaga pemerintah/bumn yang tidak berkonflik atau seperti apa ?
22. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kasi Datun dalam memperkenalkan kewenangan kejaksaan sebagai JPN ?
23. Siapa saja yang dapat menggunakan jasa bantuan hukum JPN ?
24. Menurut ibu/bapak, apakah para instansi pemerintah/BUMN/BUMD sudah banyak mengetahui tentang kewenangan kejaksaan sebagai JPN untuk memberikan bantuan hukum ?
25. Apa faktor mendukung terlaksananya fungsi bantuan hukum JPN sejauh ini ?
26. Dalam hal ini kejaksaan memiliki wewenang sebagai jaksa, berarti tunduk pada dasar yuridis UU kejaksaan atau UU Advokat No. 18 Tahun 2003 ?
27. Bagaimana urgensi kehadiran JPN di tengah pesatnya perkembangan hukum serta kebiasaan dalam dunia usaha ? Sedangkan di luar sana sudah banyak firma hukum luar.
28. Menurut bapak/ibu apakah fungsi JPN kurang dimanfaatkan oleh negara atau pemerintah guna membela kepentingannya pada perkara perdata yang terjadi khususnya secara litigasi ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1 : Bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sekaligus Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru Jaksa Ridwan Dahniel, S.H., M.H. saat melakukan wawancara riset.



Gambar 2 : Bersama Kepala Sub Seksi Perdata sekaligus Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru Jaksa Jefry Armando Putra, S.H., M.H. saat melakukan wawancara riset.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : Bersama para staf seksi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru.



Gambar 4 : Persiapan menuju wawancara riset ke ruangan seksi perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIAU

Gambar 5 : Proses menuju wawancara riset di Kejaksaan Negeri Pekanbaru



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *"PELAKSANAAN TUGAS KEJAKSAAN DALAM HAL BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG PERDATA LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU"* yang ditulis oleh :

Nama : **NUR LAILATURRAHMAH**
 NIM : 11727201360
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag.

Sekretaris
Basir, S.H., M.H.

Penguji I
Musrifah, S.H., M.H.

Penguji II
Ilham Akbar, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Lailaturrahmah
 NIM : 11727201360
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Judul : Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum
 Sebagai Pengacara Negara Di Bidang Perdata Litigasi
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
 Kejaksaan Republik Indonesia Di Kejaksaan Negeri
 Pekanbaru

Pembimbing : Dr. Nurhidayat, S.H. M.H.,

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman
 yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

Cipta melindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Un. 04/F.I/PP.00.9/3145/2021

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR LAILATURRAHMAH
NIM : 11727201360
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kejaksaan Negeri Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN TUGAS BANTUAN HUKUM KEJAKSAAN SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH DALAM PERKARA PERDATA LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hal: Cpt. Dilindungi Undang-Undang
1. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
2. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
3. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
4. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
5. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
6. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
7. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
8. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
9. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
10. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
11. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
12. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
13. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
14. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
15. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
16. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
17. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
18. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
19. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
20. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
21. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
22. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
23. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
24. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
25. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
26. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
27. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
28. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
29. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
30. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
31. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
32. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
33. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
34. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
35. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
36. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
37. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
38. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
39. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
40. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
41. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
42. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
43. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
44. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
45. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
46. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
47. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
48. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
49. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
50. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
51. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
52. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
53. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
54. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
55. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
56. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
57. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
58. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
59. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
60. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
61. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
62. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
63. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
64. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
65. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
66. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
67. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
68. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
69. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
70. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
71. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
72. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
73. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
74. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
75. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
76. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
77. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
78. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
79. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
80. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
81. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
82. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
83. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
84. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
85. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
86. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
87. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
88. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
89. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
90. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
91. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
92. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
93. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
94. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
95. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
96. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
97. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
98. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
99. Cpt. Dilindungi Undang-Undang
100. Cpt. Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40225
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un041F/PP.00.9/3145/2021 Tanggal 25 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **NUR LAILATURRAHMAH**
NIM / KTP : **11727201360**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Jenjang : **S1**
Alamat : **PEKANBARU**
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TUGAS BANTUAN HUKUM KEJAKSAAN SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH DALAM PERKARA PERDATA LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU**
Lokasi Penelitian : **KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Maret 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

**KEJAKSAAN NEGERI
PEKANBARU**



SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 1991 /L.4.10.1/04/2021

Sehubungan dengan Surat Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1396/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal **Mohon Izin Melakukan PraRiset**, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : NUR LAILATURRAHMAH
No. Induk Mahasiswa : 11727201360
Semester/Tahun : VII (tujuh) / 2021
Program Studi : Ilmu Hukum S1

Benar-benar telah melaksanakan Prariset pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Februari 2021 yang berjudul "PELAKSANAAN TUGAS BANTUAN HUKUM KEJAKSAAN SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PEKANBARU, 31 MARET 2021
A. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU
K. U. G. PEMBINAAN

HERLINA MOSIR, S.H., M.H.
JAKSA NEGERI NIP. 19780206 200112 2 003





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Ket | Ringkasan Hasil | | Tahap & Penanganan Perkara | milik UIN Suska Riau | Penggugat/Pemohon/ Tuntutan Pelawan | Kasus Posisi | Masalah | Phak-Phak Dalam Perkara | | Jenis Perdata | Identitas Perkara | | Tingkat Perkara | Kedudukan Negeri | Kedudukan Negeri |
|----|--|-----------------|------------------------|----------------------------|---|--|--|--|---|--|---------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| | | Ringkasan Hasil | Penetapan / Pengadilan | | | | | | Penggugat/ Pemohon/ Pelawan | Tergugat/ Termohon/ Terlawan | | No. Reg | Tanggal Revisi | | | |
| 1 | 16 | | | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | Tahap Banding pemberi kuasa Walikota Pekanbaru | | | Upaya Hukum (Banding) | Rizky Rahmatullah, Sh Desyazimah, Sh Esmasari, Sh | Aggr walikota Pekanbaru menghentikan pembangunan perkantoran Pemko Pekanbaru di Kec. Tenayan Raya yang berada di kawasan hutan | Gugatan Pembanguan Perkantoran Pemko Pekanbaru di Kec. Tenayan Raya yang berada di kawasan hutan | Gugatan Pembanguan Perkantoran Pemko Pekanbaru di Kec. Tenayan Raya yang berada di kawasan hutan | Walikota Pekanbaru | Yayasan Yayasan Pemantau Korupsi dan Penyelamat Aset Negara (PETAKORSIPA RA) | Perdata | 12-10-17 | SKK/180/ Set- HK/146 | Banding | Kejaksaan Negeri Pekanbaru | |
| 2 | Tahap Banding pemberi kuasa Walikota Pekanbaru | | | Upaya Hukum (Banding) | Rizky Rahmatullah, Sh Desyazimah, Sh Esmasari, Sh | Penggugat mengugat Pemko Pekanbaru sebagai turut tergugat untuk melaksanakan putusan | Penggugat mengugat Pemko Pekanbaru sebagai turut tergugat untuk melaksanakan putusan | Penggugat mengugat Pemko Pekanbaru sebagai turut tergugat untuk melaksanakan putusan | Walikota Pekanbaru | Saat Pardede | Perdata | 10-01-18 | SKK/180/ Set- HK/02 | Tingkat Pertama | Kejaksaan Negeri Pekanbaru | |
| 3 | Tahap Kasasi pemberi kuasa Walikota Pekanbaru | | | Proses Persidangan | Rizky Rahmatullah, Sh Bambang Heripurwanto, Sh Desyazimah, Sh Esmasari, Sh Sukatmini, Sh | Barang Bukti dikembalikan kepada Penguat | Gugatan pengugat terhadap barang bukti yang telah di Eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru | Gugatan pengugat terhadap barang bukti yang telah di Eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru | Sdr. Budi Darmawan, SH dan Kejari Pekanbaru | Sdr. Desman, Dkk | Perdata | 24-04-18 | SKK/02/N 4.10/042 019 | Tingkat Pertama | Kejaksaan Negeri Pekanbaru | |
| 4 | Inkraht | | | | Rizky Rahmatullah, Sh Desyazimah, Sh Esmasari, Sh Eva Susanti, Sh, Mh Tulus Prayogi, Sh Didik Haryadi, Sh | Agar tergugat membatalkan izin usaha yang merugikan pengugat | Gugatan terkait pemberian izin usaha yang dikeluarkan PEMKO Pekanbaru yang merugikan Phak Pengugat | Gugatan terkait pemberian izin usaha yang dikeluarkan PEMKO Pekanbaru yang merugikan Phak Pengugat | Walikota Pekanbaru | Mohd. Salleh Bin Mohammad | Perdata | 04-09-18 | SKK/180/ Set- HK/96.a | Tingkat Pertama | Kejaksaan Negeri Pekanbaru | |
| 5 | Inkraht | | | | Rizky Rahmatullah, Sh Desyazimah, Sh Esmasari, Sh Eva Susanti, Sh, Mh Tulus Prayogi, Sh Didik Haryadi, Sh | Agar tergugat membatalkan izin usaha yang merugikan pengugat | Gugatan terkait pemberian izin usaha yang dikeluarkan PEMKO Pekanbaru yang merugikan Phak Pengugat | Gugatan terkait pemberian izin usaha yang dikeluarkan PEMKO Pekanbaru yang merugikan Phak Pengugat | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru | Mohd. Salleh Bin Mohammad | Perdata | 04-09-18 | NAKER/U MAJ/800 /363/VIII /2019 | Tingkat Pertama | Kejaksaan Negeri Pekanbaru | |

[illegible]



UIN SUSKA RIAU

JAKSA MUDA NIP. 19810329 200501 1 004

RULLY AFANDI, SH.MH

KASI DATUN

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU

PEKANBARU, 20 JANUARI 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | Anton S. S. N Eva Susanti, SH, MH Deby Rita A. S. N, MH | | | | |
| 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber: | a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum, dan tidak boleh untuk tujuan lain yang melanggar hukum. | b. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum, dan tidak boleh untuk tujuan lain yang melanggar hukum. | | | |
| 2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber: | a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum, dan tidak boleh untuk tujuan lain yang melanggar hukum. | b. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum, dan tidak boleh untuk tujuan lain yang melanggar hukum. | | | 6 |



UIN SUSKA RIAU
Inkrant



KANTOR PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU

Jalan Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru

S-1B

SURAT KUASA SUBSTITUSI Nomor : 02 /L.4.10/Gp.2/02/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANDI SUHARLIS, SH., MH
 Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri pekanbaru
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru

Selaku **Pengacara Negara**, selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa Substitusi**.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : DESSY AZIMAH, SH.
 Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru
2. Nama : ANTON SALAHUDDIN, SH.
 Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru
3. Nama : ARIE DARYANTO, SH
 Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru
4. Nama : ANANDA HERMILA, SH
 Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru

Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa Substitusi**.

K H U S U S

Untuk dan atas nama **AGUS PRAMONO** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **05/DLHK/II/2021** tanggal **01 Februari 2021** untuk mengajukan gugatan/perlawanan/bantahan terhadap Amir Makhruf Nasution dalam hal ini diwakili oleh Dr. Irawan Harahap, SH., SE., M.Kn. di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam masalah Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Pbr.

Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini Penerima Kuasa berhak untuk membuat dan menandatangani gugatan/perlawanan/bantahan; melakukan mediasi; membuat dan menandatangani proposal mediasi; membuat replik; mengajukan bukti-bukti surat; menghadirkan saksi-saksi dan ahli; menolak/ menyanggah keterangan saksi maupun ahli; serta surat-surat lainnya yang berhubungan; mengajukan kesimpulan; menyatakan dan menandatangani akta banding/ kasasi; dan membuat serta menandatangani memori banding/ kasasi atau kontra memori banding/ kasasi; menghubungi pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi; serta instansi-instansi lain yang berhubungan dengan perkara ini; melakukan tindakan-tindakan hukum lain baik diluar maupun didalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang



KANTOR PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU

Jalan Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru

S-1 B

SURAT KUASA SUBSTITUSI Nomor : 01 /L.4.10/Gp.2/02/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANDI SUHARLIS, SH., MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri pekanbaru
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru

Selaku **Pengacara Negara**, selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa Substitusi**.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

| | | |
|----|---------|---|
| 3. | Nama | : RIDWAN D, SH.MH |
| | Jabatan | : Jaksa Pengacara Negara |
| | Alamat | : Jl. Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru |
| | Nama | : ESISMA SARI, SH.MH |
| | Jabatan | : Jaksa Pengacara Negara |
| | Alamat | : Jl. Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru |
| 4. | Nama | : JEFRI A POHAN, SH.MH |
| | Jabatan | : Jaksa Pengacara Negara |
| | Alamat | : Jl. Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru |
| 5. | Nama | : EVA SUSANTI, SH.MH |
| | Jabatan | : Jaksa Pengacara Negara |
| | Alamat | : Jl. Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru |
| | Nama | : NELLY KRISTINA, SH |
| | Jabatan | : Jaksa Pengacara Negara |
| | Alamat | : Jl. Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru |

Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa Substitusi**.

K H U S U S

Untuk dan atas nama **DR. H. FIRDAUS, ST., MT.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **180/SETDA-HK/SKK/06/2021** tanggal **01 Februari 2021** untuk mengajukan gugatan/perlawanan/bantahan terhadap Amir Makhruf Nasution di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam masalah Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Pbr.

Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini Penerima Kuasa berhak untuk membuat dan menandatangani gugatan/perlawanan/bantahan; melakukan mediasi; membuat dan menandatangani proposal mediasi; membuat replik; mengajukan bukti-bukti surat; menghadirkan saksi-saksi dan ahli; menolak/ menyanggah keterangan saksi maupun ahli; serta surat-surat lainnya yang berhubungan; mengajukan kesimpulan; menyatakan dan menandatangani akta banding/ kasasi; dan membuat serta menandatangani memori banding/ kasasi atau kontra memori banding/ kasasi; menghubungi pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi; serta instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; melakukan tindakan-tindakan

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT PENULIS

Nur Lailaturrahmah, lahir di Alahair pada 12 Maret 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara ini merupakan putri dari pasangan bapak Hayat,Amd (ALM) dan ibu Dra.Siti Subandiyah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah dasar di SD Negeri 30 Alahair (2010), Madrasah Tsanawiyah di MTs Negeri Selatpanjang (2014) dan Madrasah Aliyah di MAN 1 Kepulauan Meranti (2017).

Setelah lulus dari bangku aliyah, melalui jalur undangan penulis melanjutkan pendidikannya ke universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum dengan konsentrasi yang dipilihnya yakni Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, dalam rangka mengaplikasikan ilmu/teori yang telah dipelajari selama di bangku kuliah, maka penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Negeri Kelas II Sawahlunto, Sumatera Barat selama satu setengah bulan. Penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan seminar nasional maupun internasional seperti : “LPDP For Your Future”, “Your Success It’s Begin From Improving Your Public Speaking Skill”, “Bangun Karakter Pemuda Islam Dengan Kecintaan Kepada Al-Qur’an dan lain-lain. Dalam rangka membangun relasi, penulis juga aktif dalam kegiatan berorganisasi baik internal maupun eksternal seperti : Sekolah Inspirasi Suska, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Syariah dan Hukum, HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Rohis Fakultas yakni FK-MASSYA (Forum Kajian Mahasiswa Syariah dan Hukum), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan PKS-Muda.

Pada hari Kamis 1 Juli 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan **LULUS** jenjang strata satu dan menggandeng gelar sarjana hukum (S.H.) dengan judul skripsi “Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum Sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.